

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta penelitian yang dilakukan di lapangan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil implementasi kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2012 telah sesuai pada peraturan-peraturan Kementerian Sosial khususnya Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan. Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan terdiri dari tiga Cluster, yang masing-masing berupaya meningkatkan taraf ekonomi RTSM.
2. Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Kabupaten Bantul tahun 2012 secara umum sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal seperti masalah sosialisasi yang perlu ditingkatkan serta penyimpangan bantuan PKH.
3. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2011-2012 berjalan dengan baik. Untuk program KUBE ternyata telah berhasil memutus tali atau rantai kemiskinan.
4. Dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan Kabupaten

keterlibatan pihak ketiga (tim ahli dan pendamping) dalam proses implementasi, ada kedisiplinan warga untuk terus aktif dalam berbagai program-program UMK, adanya keseriusan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial berupa bantuan alokasi dana dan training untuk pendamping. Namun ada juga penghambat seperti sulitnya mengontrol RTSM yang menggunakan dana bantuan PKH tidak tepat sasaran. Kesadaran masyarakat yang masih rendah, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Masyarakat yang berada di desa yang jauh dari kecamatan cenderung malas melakukan proses sosialisasi sehingga pelaksana sulit dalam melakukan pendataan.

5. Manajemen organisasi di internal Dinas Sosial seperti komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur organisasi sudah cukup baik, hal ini terlihat jarang terjadi *overlapping* atau tumpang tindih tugas satu dengan yang lainnya. Masing-masing petugas telah mengetahui fungsi dan peran masing-masing

B. Saran

Saran yang dapat ditawarkan oleh peneliti dari hasil pengamatan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sistem yang lebih mudah dalam upaya memonitoring peserta KUBE dan PKH. Artinya Dinas Sosial harus mampu menciptakan sistem kontroling agar penggunaan dana bantuan PKH tepat sasaran

2. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan dan berkala serta dilakukan secara jelas agar sosialisasi bisa lebih efektif. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara membentuk tim baru yang dapat menjelaskan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang pentingnya program pengentasan kemiskinan.
3. Penambahan tim pendamping KUBE dan PKH untuk mengoptimalkan program yang ada karena program KUBE harus di awasi secara berkelanjutan agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan atau usaha-usaha dari pihak swasta lainnya.